

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai mekanisme pengelolaan bantuan sosial pada masa covid 19 khususnya tahun 2020 di Kabupaten Manggarai maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Penganggaran

Pemerintah Kabupaten Manggarai memberikan anggaran sebesar Rp 35,051,396,154,13 yang sepenuhnya merupakan dana BTT. Dana BTT tersebut digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemic covid 19 di Kabupaten Manggarai yang disalurkan pada tahun 2020. Mekanisme pengelolaan penganggaran bantuan sosial di Kabupaten Manggarai telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dimana telah melaksanakan penganggaran sesuai prosedur yang ada.

2) Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pada tahapan pelaksanaan bantuan sosial yang terjadi di Kabupaten Manggarai telah didasarkan sesuai dengan prosedur pemberian bantuan sosial yang ada. Namun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ini adalah pemberian bantuan sosial khususnya bantuan BLT yang baru dijalankan pemerintah saat virus corona mewabah pada tahun 2020, namun BLT yang baru dijalankan ini justru hanya disalurkan dengan syarat, yaitu penerima

merupakan masyarakat berdaya pak dan tidak menerima Bantuan sosial dari program pemerintahan lainnya seperti PKH dan Bantuan pangan non tunai lainnya (BPNT). Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai jenis persoalan dalam sasaran penerima BLT tersebut, seperti adanya pendobelan nama misalnya sudah menerima PKH, BPNT, meninggal dunia, perangkat Desa, pensiunan PNS, warga yang sudah pindah domisili. Ini terjadi secara nasional diseluruh Indonesia khususnya di Manggarai yaitu karena ada data lama dan data baru tetapi digabung menjadi satu di pusat, dan tugas pihak pengelola hanya mengirim data sesuai dengan kuota dengan data valid bersumber dari desa dan kelurahan.

3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial pada tahun 2020 cukup efektif karena pengguna anggaran telah memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dan didukung oleh bukti kwitansi yang dimasukkan dengan lengkap. Hanya masih terdapat keterlambatan dalam memasukan laporan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

4) Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi bantuan sosial di Kabupaten Manggarai tahun 2020 sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan infrastruktur seperti kelayakan jalan menuju desa-

desa terpencil sehingga dapat membantu melancarkan proses penyaluran bantuan sosial serta dapat mensosialisasikan program Bantuan Sosial.

2. Bagi Instansi Pengelolaan Bantuan Sosial dalam hal Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai harus bertindak tegas dalam melakukan pengawasan bantuan sosial sehingga bantuan yang diberikan tersebut benar-benar tepat sasaran. Pada pihak pengelola bansos harus lebih mensosialisasikan program yang ada keseluruh masyarakat, bukan hanya untuk sebagian kecil saja. Selain itu harus diberikan panduan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk lebih sering mensosialisasikan terkait bantuan sosial, dan Pemerintah Desa dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
3. Bagi penerima bantuan sosial agar lebih memperhatikan penggunaan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan diharapkan dapat memperhatikan batas pelaporan penggunaan dana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai data Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Manggarai tahun 2017-2020
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 19 tentang *Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua*
- Kompasiana (2020). Komunikasi krisis dalam upaya Pemerintah Indonesia menangani Covid19. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/politik/pemerintahan>
- Darmastuti, Dewi & Dyah Setyaningrum. . Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009. .: Universitas Indonesia
- H Ridwan (2019) *Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan serta Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi*
- Gunadha, R., & Nabilla, F. (2020). Sebulan pandemi corona, Pemerintah sudah keluarkan 5 aturan. Suara.Com. [https://www.suara.com/news/2020/04/07/213123/sebulan-pandemi coronapemerintah-sudah-keluarkan-5-aturan](https://www.suara.com/news/2020/04/07/213123/sebulan-pandemi-coronapemerintah-sudah-keluarkan-5-aturan)
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. *Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <http://kppnmetro.org/belanja-bantuan-sosial-57/> diakses pada tanggal 12 maret 2021
- <https://covid19.go.id/tanyajawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi> diakses pada tanggal 12 maret 2021
- <https://www.florespost.co/2020/05/13/data-penerima-blt-di-manggarai-rancu/> diakses pada tanggal 12 maret 2021
- https://banten.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Tulisan-Hukum-Rev-Mas-Adi-ke-2-Mekanisme-Pemberian-Hibah-Bansos-yang-bersumber-dari-APBD-pasca-Permen-13-2018_upload-web.pdf diakses pada tanggal 12 maret 2021
- Indonesia, P. R. (2020b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 (Lembaran N). Sekretariat Negara.

Kompasiana (2020).Komunikasi krisis dalam upaya Pemerintah Indonesia menanggapiCovid 19.Kompasiana.<https://www.kompasiana.com/politik/pe-merintahan>

[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html](https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*

Peraturan menteri keuangan No 228/PMK.05/2016 *tentang Belanja bantuan Sosial*

Prof.Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto,2015, *Akuntansi Keuangan Daerah berbasis Akrua*,Jakarta, Salemba Empat

Praptiningsih, F. S. D. (2017). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa tahun 2014*. Prodi Akuntansi

Suharto,E. 2009. *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia : menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan*. Bandung. Alfabeta.